

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah setidaknya menempatkan dua persyaratan pada pemerintah daerah yaitu aspek pendapatan dan unsur pengendalian belanja daerah. Setiap daerah wajib mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Termasuk di dalamnya permintaan agar daerah bisa mengelola keuangan daerahnya sendiri, dengan PAD sebagai sumber utama pendanaan (Mardiasmo, 2018).

Pasal 1 ayat 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari sumber dalam wilayah hukumnya sendiri dan dipungut dengan norma daerah dan peraturan undang-undang terkait. Demikian pula rencana anggaran akan membantu pemerintah daerah dalam mengatur masalah keuangan dan dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan daerah (Siregar, 2017).

Selain mendukung PAD, program daerah berdasarkan peraturan daerah dibutuhkan jika PAD ingin menjadi alat bagi pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Suparmoko, 2009).

Sederhananya, PAD adalah uang tunai yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu dari dalam batasnya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat. Peran utama sektor pendapatan daerah untuk memaparkan kapasitas daerah dalam mendukung pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017).

Selama diberlakukannya sistem otonomi daerah, setiap daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota berusaha menaikkan potensi daerah mereka untuk menaikkan pendapatan asli daerahnya. Bisa dilihat dari PAD nasional Indonesia periode 2017-2020 yang berfluktuatif setiap tahunnya, walaupun sangat disayangkan terjadi penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2017 PAD nasional sebesar 274.032,67 miliar dan di

tahun 2018 sebesar 272.981,06 miliar dengan laju pertumbuhan 0,38%. Pada tahun 2019 PAD nasional meningkat sebesar 293.659,55 miliar dengan laju pertumbuhan 7,57%. Sangat disayangkan pandemi Covid-19 yang menimpa tanah air dan membuat PAD nasional sedikit menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 264.065,97 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar -10%. Dengan kenaikan yang berfluktuatif pada periode 2017-2020 ini, didapat rata-rata laju pertumbuhan PAD nasional sebesar -0,96%. Untuk itu tiap daerah diminta menaikkan potensi dari masing daerah agar bisa menaikkan PAD nasional (<https://djpk.kemenkeu.go.id>).

Walaupun PAD nasional periode 2017-2020 rata-rata laju pertumbuhannya di angka negatif, PAD Provinsi Sumatera Barat pada periode yang sama berada di angka positif ataupun mengalami kenaikan. Pertumbuhan PAD Sumatera Barat selama periode 2017 sampai 2020 mengalami pertumbuhan yang juga berfluktuasi. Tahun 2017 PAD Sumatera Barat sebesar 2.134,01 miliar dan di tahun 2018 sebesar 2.275,09 miliar dengan pertumbuhan sebesar 6,6% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 2.328,43 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 2,3%. Namun di tahun 2020 angkanya lebih kecil menjadi 2.255,07 miliar dengan laju pertumbuhannya sebesar -3,1%. Dari angka-angka di atas bisa dikatakan bahwa PAD Sumatera Barat selama periode yang sama yaitu 2017-2020 juga mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,93% pertahun (BPS, 2020).

Dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, penyumbang keuangan terbesar adalah PKB dan BBNKB. Bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, Sumatera Barat mempunyai PAD yang kecil di pulau Sumatera. Provinsi Aceh dan Riau mempunyai potensi kilang minyak dan gas, Sumatera Utara mempunyai potensi perkebunan, Sumatera Selatan dengan potensi tambang dan Lampung sebagai daerah jalur ekonomi. Berlandaskan UPTD-P3 (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Provinsi) Kota Padang tahun 2020 memaparkan realisasi PKB dan BBNKB sudah melampaui target 633 miliar ataupun sekitar 104,04%. Target pada

waktu itu 609 miliar dan menjelang akhir tahun juga menembus mencapai 640 miliar, dengan ini UPT-P3 Kota Padang menyumbang 65% PAD bagi daerah (BPS, 2020).

Dalam PAD terdapat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Namun tidak menghambat kemungkinan terdapat indikator lain yang berpotensi bisa mempengaruhi jumlah PAD. Selain PKN juga BBNKB terdapat hal lain yang berpengaruh pada PAD Sumatera Barat.

Seiring dengan meningkatnya PAD Sumatera Barat pada periode 2017-2020 terlihat bahwa PDRB Sumatera Barat juga mengalami kenaikan. PDRB Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 155.984,36 miliar dan di tahun 2018 sebesar 163.996,19 miliar dengan laju pertumbuhan sebesar 5,14%. Di tahun 2019 PDRB Sumatera Barat kembali meningkat sebesar 172.213,79 miliar dengan laju pertumbuhan 5,01%. Tahun 2020 PDRB Sumatera Barat mengecil menjadi 169.458,11 miliar dengan laju pertumbuhan -1,6%. Dilihat dari data tersebut, bisa dikatakan bahwa PDRB Sumatera Barat pada periode yang sama yaitu 2017-2020 juga mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 2,85% pertahun (BPS, 2020).

Seiring dengan meningkatnya jumlah PAD dan PDRB Sumatera Barat pada periode 2017-2020, pada periode yang sama jumlah penduduk Sumatera Barat juga mengalami pertumbuhan atau kenaikan. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 5.321.489 jiwa dan di tahun 2018 meningkat sebesar 5.382.077 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,13%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Sumatera Barat kembali meningkat sebesar 5.441.197 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09%. Di tahun 2020 juga naik ke angka 5.534.472 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,7%. Dari angka-angka di atas bisa dikatakan bahwa pada periode yang sama dengan PAD dan PDRB yaitu 2017-2020, jumlah penduduk Sumatera Barat juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,3% pertahunnya (BPS, 2020).

Sama halnya dengan PDRB dan jumlah penduduk yang meningkat, pada periode yang sama yaitu 2017-2020 jumlah kendaraan bermotor nyatanya juga mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat yang membayar pajak di tahun 2017 sebesar 992.785 unit dan di tahun 2018 meningkat menjadi 1.014.692 unit dengan laju pertumbuhan 2,2%. Di tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat kembali meningkat menjadi 1.044.375 unit dengan laju pertumbuhan sebesar 2,9%. Di tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat sedikit mengecil ke angka 967.504 unit dengan laju pertumbuhan -7,3%. Dari angka-angka di atas bisa disimpulkan bahwa meningkatnya PDRB dan jumlah penduduk di tahun 2017-2020, di periode yang sama jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat juga mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 1% pertahun (BPS, 2020).

Apakah memang benar PAD Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh jumlah PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Penulis ingin mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah kendaraan Bermotor pada PAD Sumatera Barat”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas diatas akibatnya akan diangkat beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari PDRB pada PAD di Sumatera Barat
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk pada PAD Sumatera Barat
3. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor pada PAD Sumatera Barat

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berlandaskan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas yaitu:

1. menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap PAD Sumatera Barat.
2. menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Sumatera Barat.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD Sumatera Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai informasi kepada publik mengenai perkembangan PAD Sumatera Barat.
2. Sebagai informasi kepada publik mengenai pengaruh PDRB terhadap PAD Sumatera Barat.
3. Sebagai informasi kepada publik mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD Sumatera Barat.
4. Sebagai informasi kepada publik mengenai pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap PAD Sumatera Barat.
5. Penelitian ini bisa berguna sebagai acuan penelitian berikutnya tentang PAD.

